

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- _____. *Undang-Undang tentang Perdagangan*. UU Nomor 7 Tahun 2014.
- _____. *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*. UU Nomor 23 Tahun 2014.
- _____. *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*. UU Nomor 30 Tahun 2014.
- _____. *Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*. Perda Nomor 11 Tahun 2012.

B. Buku

- Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, 1999.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Fachruddin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni, 2004.
- H.R., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Perizinan: Bahan Hukum Penataran Hukum Administrasi Negara*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1992.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.

Kurnia, Mahendra Putra, dkk. *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Prins, W.F. dan Kosim Adisapoetra. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1987.

Pudyatmoko, Y. Sri. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo, 2009.

Purbopranoto, Kuntjoro. *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*. Jakarta: BPHN-Bina Cipta, 1991.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.

Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

_____. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

C. Lain-lain

Fakrulloh, Zudan Arif. "Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Pembangunan Substansi Hukum di Daerah". *Paper* disampaikan dalam acara Badan Pembinaan Hukum Nasional, 7 Juni 2011 di Palembang.

Hadjon, Philipus M. "Tentang Wewenang". *Majalah Yuridika*, Nomor 5 & 6, Edisi September s/d Desember, 1997.

Hayati, Tri. "Perizinan Pertambangan di Era Reformasi Pemerintahan Daerah Studi Tentang Perizinan Pertambangan Timah di Pulau Bangka". *Disertasi*. Jakarta: Program Pascasarjana UI, 2011.

Ikhwani, Muhammad. "Teori Desentralisasi (Pembagian Urusan Pemerintahan di Indonesia)". Tersedia di <http://studihukum.blogspot.com>. Diakses tanggal 10 Mei 2019.

- Natsir, Irwan. "Jumlah Mini Market di Kab. Bogor Tembus 1.090 Unit". <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01307707/jumlah-mini-market-di-kab-bogor-tembus-1090-unit>. Diakses tanggal 23 Februari 2021.
- Ngadino, Agus. "Perizinan Dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis". <http://eprints.unsri.ac.id>. Diakses tanggal 18 September 2020.
- Redaksi. "Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan". <http://dpmpptsp.bogorkab.go.id>. Diakses tanggal 10 Januari 2020.
- Syafrudin, Ateng. "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab". *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV.
- Yasyari, "Andi Muhammad Faizal. Tinjauan Yuridis Kewenangan Pemerintah Kota Dalam Pemberian Izin Toko swalayan di Kota Makassar". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2012.